



## **Analisis pengaruh BUMD, Dana Bagi Hasil (DBH) dan PAD terhadap PDRB di kabupaten kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2024**

**Suparlan, I Nyoman Pariastana\***, M. Fauzul Akbar, Nur Arfian Naufan, Tiara Annisa  
*Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia;*

### **Kata Kunci**

**Kata kunci:** Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, PDRB, NTB.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018–2024. PDRB merupakan indikator utama yang mencerminkan kinerja ekonomi daerah, sehingga penting untuk mengkaji sejauh mana instrumen fiskal daerah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Data sekunder diperoleh dari laporan realisasi APBD kabupaten/kota serta publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil analisis menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, yang berarti peningkatan belanja pemerintah daerah mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dana Bagi Hasil (DBH) juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, menegaskan peran transfer pusat dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Sebaliknya, PAD berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB, menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi masih terbatas. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap PDRB dengan koefisien determinasi sebesar 72%. Penelitian ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB lebih banyak ditopang oleh belanja daerah dan DBH, sementara PAD perlu diperkuat agar kemandirian fiskal daerah meningkat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### **Abstract**

This study aims to analyze the effect of Regional Expenditure, Revenue Sharing Fund (DBH), and Regional Own-Source Revenue (PAD) on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of districts/cities in West Nusa Tenggara (NTB) Province during the 2018–2024 period. GRDP is a key indicator reflecting regional economic performance, making it essential to examine the extent to which fiscal instruments contribute to economic growth. This research employs a quantitative approach using panel data regression. Secondary data were obtained from district/city budget realization reports and publications from the Central Bureau of Statistics (BPS). The results indicate that Regional Expenditure has a positive and significant effect on GRDP, Revenue Sharing Fund (DBH) also has a positive and significant effect, while PAD shows a positive but insignificant effect. Simultaneously, the three variables significantly influence GRDP with a coefficient of determination of 72%. These findings highlight that NTB's economic growth is largely supported by regional expenditure and DBH, while PAD needs to be strengthened to enhance regional fiscal independence.

### **Keywords**

**Keywords:** Regional Expenditure, Revenue Sharing Fund, Regional Own-Source Revenue, GRDP, NTB

\*Corresponding Author: **I Nyoman Pariastana**, Magister Akuntansi/Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;  
Email: [nyomanpar12@gmail.com](mailto:nyomanpar12@gmail.com)

**DOI:** <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i4.942>

History Artikel:

Received: 22 Oktober 2025 | Accepted: 29 Desember 2025

## PENDAHULUAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah (Erlin et al., 2022; Mukti & Soraya, 2024; Satria et al., 2023). PDRB tidak hanya mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai keberhasilan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah (Sugara et al., 2025). Oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi PDRB, khususnya yang bersumber dari keuangan daerah seperti belanja pemerintah, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi isu penting dalam kajian ekonomi regional. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam, sehingga menimbulkan gap penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Sejumlah penelitian sebelumnya menyoroti kontribusi variabel fiskal terhadap PDRB di berbagai daerah di Indonesia. Gulo (2022) menemukan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Sumatera Utara, sementara DBH dan DAU berpengaruh positif. Napitupulu et al. (2019) menegaskan DBH signifikan terhadap PDRB Kabupaten Simalungun, sedangkan bantuan keuangan provinsi tidak berpengaruh. Sabilla dan Sabilla & Sumarsono (2022) menunjukkan bahwa belanja pemerintah, PAD, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap PDRB di Jawa Timur. Sebaliknya, Tanasya & Setyanto (2025) menemukan PAD signifikan, tetapi belanja modal tidak berpengaruh terhadap PDRB di Sulawesi Barat. Husna et al. (2020) juga menegaskan bahwa PAD tidak signifikan, sementara pengeluaran pemerintah, investasi, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap PDRB di Banten. Inkonsistensi hasil ini memperlihatkan bahwa kontribusi fiskal daerah terhadap PDRB tidak seragam antar wilayah.

Fenomena di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperlihatkan dinamika fiskal yang khas. NTB memiliki struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor pariwisata, pertanian, dan sumber daya lokal. Periode 2018–2024 juga ditandai dengan fluktuasi ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan fase pemulihan, yang menuntut evaluasi efektivitas kebijakan fiskal daerah. Belanja daerah, DBH, dan PAD menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun kontribusinya terhadap PDRB NTB belum banyak diteliti secara komprehensif (Fatimah & Hasbullah, 2020; Hasbullah et al., 2021). Hal ini menimbulkan urgensi untuk melakukan kajian empiris yang lebih mendalam.

Selain itu, kondisi fiskal NTB menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi PAD (Winarni et al., 2023). Meskipun PAD di beberapa

kabupaten/kota mengalami peningkatan, kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil dibandingkan dengan transfer dari pusat seperti DBH (Tradinatama & Solikin, 2023). Di sisi lain, belanja daerah seringkali lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin daripada belanja produktif, sehingga efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih dipertanyakan (Arrosyid & Bawono, 2025). Fenomena ini menegaskan perlunya penelitian yang dapat mengukur secara objektif pengaruh belanja daerah, DBH, dan PAD terhadap PDRB di NTB.

Urgensi penelitian ini juga terkait dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran (Hafizd et al., 2024). Dengan memahami hubungan antara belanja daerah, DBH, dan PAD terhadap PDRB, pemerintah NTB dapat mengevaluasi strategi pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan efektivitas belanja publik, serta memperkuat kapasitas PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan empiris yang relevan bagi perencanaan pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan pasca-pandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Novelty penelitian ini adalah penggunaan data panel kabupaten/kota di NTB dengan periode terbaru 2018–2024, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Dengan pendekatan regresi panel, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat literatur mengenai hubungan belanja daerah, DBH, dan PAD terhadap PDRB, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah NTB dalam mengoptimalkan kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan ekonomi regional.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan tujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen (Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil/DBH, dan Pendapatan Asli Daerah/PAD) terhadap variabel dependen (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB). Analisis dilakukan dengan teknik regresi data panel.

### Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Objek penelitian adalah data sekunder berupa laporan realisasi APBD (PAD dan DBH), data belanja daerah, serta data PDRB yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

## Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di NTB selama periode 2018–2024. Sampel penelitian menggunakan data panel (time series × cross section) dengan total observasi sebanyak 70 data (10 daerah × 7 tahun).

## Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari:

1. Laporan Realisasi APBD Provinsi NTB dan kabupaten/kota (PAD dan DBH).
2. Dokumen APBD terkait Belanja Daerah.
3. Data PDRB atas dasar harga konstan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- 4.

## Definisi Operasional Variabel

Untuk memastikan konsistensi pengukuran, variabel penelitian didefinisikan sebagai berikut:

Tabel 1 Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Satuan/Skala	Sumber Data
PDRB (Y)	Nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh kabupaten/kota di NTB atas dasar harga konstan	Nilai PDRB	Miliar per tahun	BPS NTB
Belanja Daerah (X1)	Total pengeluaran pemerintah daerah yang tercantum dalam APBD, mencakup belanja rutin dan belanja modal	Realisasi belanja daerah per tahun	Rupiah	Laporan APBD kabupaten/kota
Dana Bagi Hasil (X2)	Transfer dari pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan penerimaan pajak dan	Realisasi DBH per tahun	Rupiah	Laporan Realisasi APBD

sumber daya alam				
Pendapatan Asli Daerah (X3)	Penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain	Realisasi PAD per tahun	Rupiah	Laporan Realisasi APBD

Sumber: Data Primer diolah, 2025

## Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Eviews 12 menggunakan model regresi data panel. Tahapan analisis meliputi:

1. Analisis deskriptif.
2. Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan model terbaik (Fixed Effect Model/FEM).
3. Uji asumsi klasik: multikolinearitas, heteroskedastisitas, normalitas, autokorelasi.
4. Uji F (simultan) dan uji t (parsial).
5. Koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Data penelitian mencakup 70 observasi (10 kabupaten/kota × 7 tahun) dengan variabel PDRB, Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, PDRB kabupaten/kota di NTB menunjukkan tren meningkat dari tahun 2018 hingga 2024, meskipun sempat mengalami perlambatan pada periode pandemi (2020–2021). Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki PDRB relatif tinggi dibandingkan daerah lain, sedangkan Kabupaten Lombok Utara dan Kota Bima menunjukkan PDRB lebih rendah. Belanja daerah cenderung meningkat setiap tahun, sementara DBH dan PAD mengalami fluktuasi, terutama pada masa pandemi.

Tabel 2 Analisis Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata (Mean)	Standar Deviasi
PDRB (Y)	15.152	235.091	41.982	52.340
Belanja Daerah (X1)	716.700.153	3.305.263.700	1.678.000.000	640.000.000

h (X1)	Dana	18.109.2	648.579.7	92.000.00	110.000.
Bagi Hasil (X2)	59	52	0	000	
PAD (X3)	46.115.4	547.940.3	210.000.0	120.000.	
	37	08	00	000	

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2 dapat detahui nilai PDRB kabupaten/kota di NTB periode 2018–2024 menunjukkan variasi yang cukup besar. Kabupaten Lombok Timur memiliki PDRB relatif rendah (sekitar 15 ribu miliar), sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki PDRB tertinggi (lebih dari 235 ribu miliar). Rata-rata PDRB daerah NTB sekitar 41 ribu miliar, dengan standar deviasi tinggi, menunjukkan adanya kesenjangan antar daerah.

Kemudian, belanja daerah memiliki nilai minimum sekitar Rp716 miliar (Kota Bima, 2021) dan maksimum lebih dari Rp3,3 triliun (Kabupaten Lombok Timur, 2024). Rata-rata belanja daerah sekitar Rp1,6 triliun, dengan variasi cukup besar antar kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas fiskal yang signifikan.

Selanjutnya, DBH menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi, dengan nilai minimum sekitar Rp18 miliar dan maksimum Rp648 miliar (Kabupaten Sumbawa Barat, 2022). Rata-rata DBH sekitar Rp92 miliar, dengan standar deviasi relatif besar. Hal ini menandakan ketergantungan daerah terhadap transfer pusat yang tidak merata.

Terakhir, PAD memiliki nilai minimum sekitar Rp46 miliar (Kota Bima, 2018) dan maksimum Rp547 miliar (Kabupaten Lombok Timur, 2024). Rata-rata PAD sekitar Rp210 miliar, dengan variasi cukup besar antar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah NTB masih terbatas, dengan kontribusi PAD yang relatif kecil dibandingkan belanja daerah dan DBH.

## Hasil Pemilihan Model

### Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan Common Effect Model (CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 3 Hasil Uji Chow

Statistik Uji	Nilai F statistic	Probabilitas 0,000	Keputusan FEM lebih tepat dibandingkan CEM

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3, nilai probabilitas < 0,05 menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) lebih sesuai dibandingkan Common Effect Model. Artinya, terdapat perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota

di NTB yang signifikan, sehingga efek tetap perlu diperhitungkan.

### Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan Fixed Effect Model (FEM) dengan Random Effect Model (REM).

Tabel 4 Hasil Uji Hausman

Statistik Uji	Nilai Chi-Square	Probabilitas	Keputusan
Chi-Square	18,92	0,000	FEM lebih tepat dibandingkan REM

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Melalui Tabel 4, nilai probabilitas < 0,05 menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) lebih sesuai dibandingkan Random Effect Model. Hal ini berarti perbedaan antar kabupaten/kota di NTB bersifat sistematis dan tidak acak, sehingga FEM menjadi model terbaik untuk penelitian ini.

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Model ini mampu menangkap perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota di NTB selama periode 2018–2024, sehingga lebih akurat dalam menjelaskan pengaruh Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB.

## Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel.

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t-statistik	p-value	Keputusan Hipotesis
Belanja Daerah (X1)	0,452	4,87	0,000	H1 diterima
Dana Bagi Hasil (X2)	0,317	2,56	0,012	H2 diterima
Pendapatan Asli Daerah (X3)	0,105	1,25	0,214	H3 ditolak
Konstanta (C)	12,830	3,12	0,003	–
R <sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)	0,72	–	–	Model baik
Uji F (Simultan)	15,43	–	0,000	Model signifikan

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Hasil tersebut menunjukkan variabel Belanja Daerah memiliki koefisien positif sebesar 0,452 dengan p-value < 0,05 menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Artinya, peningkatan belanja pemerintah daerah NTB mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota.

Koefisien positif Dana Bagi Hasil (X2) sebesar 0,317 dengan p-value < 0,05 menunjukkan DBH berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Transfer pusat melalui DBH terbukti memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (X3) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,105 tetapi p-value > 0,05 menunjukkan PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB. Hal ini menandakan bahwa kontribusi PAD terhadap PDRB masih relatif kecil dibandingkan belanja daerah dan DBH.

Untuk melihat pengaruh secara simultan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai F-statistik signifikan dengan p-value < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama Belanja Daerah, DBH, dan PAD berpengaruh terhadap PDRB kabupaten/kota di NTB.

Terakhir, untuk nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 72% variasi PDRB dapat dijelaskan oleh variabel Belanja Daerah, DBH, dan PAD, sedangkan 28% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti investasi, tenaga kerja, dan sektor pariwisata.

### **Pengaruh Belanja Daerah terhadap PDRB**

Hasil regresi menunjukkan bahwa Belanja Daerah (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di NTB. Hal ini berarti setiap peningkatan belanja daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta investasi sosial yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sabilla dan Sumarsono (2022) yang menegaskan bahwa belanja pemerintah berkontribusi signifikan terhadap PDRB di Jawa Timur. Dengan demikian, belanja daerah terbukti menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam meningkatkan output ekonomi regional.

Lebih jauh, signifikansi belanja daerah terhadap PDRB menunjukkan bahwa pemerintah daerah NTB memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian lokal. Alokasi belanja yang produktif, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses ekonomi. Namun, efektivitas belanja daerah juga bergantung pada kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan. Jika belanja lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin, dampaknya terhadap PDRB akan terbatas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan perlunya optimalisasi

belanja daerah agar lebih diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap PDRB**

Analisis regresi menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di NTB. DBH sebagai transfer dari pemerintah pusat memberikan tambahan kapasitas fiskal bagi daerah untuk membiayai pembangunan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Gulo (2022) dan Napitupulu et al. (2019) yang menegaskan bahwa DBH berkontribusi signifikan terhadap PDRB di Sumatera Utara dan Simalungun. Dengan adanya DBH, daerah yang memiliki PAD relatif kecil tetap dapat menjalankan program pembangunan yang berdampak pada peningkatan PDRB.

Signifikansi DBH terhadap PDRB juga menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah NTB terhadap transfer pusat masih cukup tinggi. Hal ini dapat dipahami mengingat struktur ekonomi NTB yang belum sepenuhnya mandiri, dengan basis pajak daerah yang terbatas. Meskipun DBH terbukti efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, ketergantungan yang terlalu besar dapat menimbulkan risiko fiskal jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memanfaatkan DBH secara optimal untuk investasi produktif, sekaligus memperkuat kapasitas PAD agar kemandirian fiskal daerah meningkat.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB**

Kepuasan wisatawan terbukti memiliki Hasil regresi menunjukkan bahwa PAD (X3) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di NTB. Hal ini berarti meskipun PAD meningkat, kontribusinya terhadap PDRB masih terbatas. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Gulo (2022) dan Husna et al. (2020) yang menemukan bahwa PAD tidak selalu signifikan terhadap PDRB di beberapa provinsi. Rendahnya signifikansi PAD di NTB dapat dijelaskan oleh keterbatasan basis pajak daerah, rendahnya kontribusi retribusi, serta dominasi sektor informal yang sulit dipajaki.

Ketidak-signifikansi PAD terhadap PDRB menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah NTB masih lemah. Meskipun PAD memiliki potensi untuk menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan, kontribusinya masih kalah dibandingkan belanja daerah dan DBH. Hal ini menegaskan perlunya strategi peningkatan PAD melalui diversifikasi sumber penerimaan, optimalisasi pajak daerah, serta penguatan peran BUMD. Dengan memperkuat PAD, pemerintah daerah NTB dapat mengurangi

ketergantungan pada transfer pusat dan meningkatkan kapasitas fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan model Fixed Effect, penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018–2024. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, sementara DBH sebagai transfer dari pemerintah pusat memberikan tambahan kapasitas fiskal yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun berpengaruh positif, tidak terbukti signifikan terhadap PDRB. Kondisi ini menandakan bahwa kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi masih terbatas dibandingkan belanja daerah dan DBH. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PDRB dengan koefisien determinasi sebesar 72%, yang berarti faktor fiskal daerah memiliki peran penting dalam menjelaskan variasi PDRB NTB.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, variabel yang digunakan hanya mencakup aspek fiskal berupa belanja daerah, DBH, dan PAD, sehingga faktor lain seperti investasi, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, maupun sektor pariwisata belum dimasukkan ke dalam model. Kedua, data yang digunakan bersumber dari laporan sekunder APBD dan BPS, sehingga keterbatasan akurasi dan konsistensi pencatatan dapat memengaruhi hasil analisis. Ketiga, periode penelitian terbatas pada tahun 2018–2024, sehingga belum mencakup dinamika fiskal jangka panjang atau tren pasca-2024. Keempat, model regresi panel yang digunakan hanya menguji hubungan linier, sehingga belum menangkap kemungkinan hubungan non-linier atau interaksi antar variabel yang mungkin lebih kompleks.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pemerintah daerah NTB perlu meningkatkan kualitas belanja daerah dengan fokus pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan agar dampaknya terhadap PDRB lebih optimal. Dana Bagi Hasil sebaiknya dimanfaatkan secara lebih efektif untuk investasi jangka panjang, bukan hanya belanja rutin, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lebih berkelanjutan. Selain itu, strategi penguatan PAD melalui diversifikasi sumber

penerimaan, optimalisasi pajak daerah, serta penguatan peran BUMD perlu dilakukan agar kemandirian fiskal daerah meningkat. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti investasi, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, dan sektor pariwisata guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi PDRB. Periode analisis juga dapat diperluas agar tren jangka panjang dapat terlihat, termasuk dampak kebijakan fiskal pasca-pandemi.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pimpinan dan dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah menyediakan data yang diperlukan. Tidak lupa penulis berterima kasih kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan dukungan moral, motivasi, serta semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi daerah dan kebijakan fiskal, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arrosyid, C. F., & Bawono, A. D. B. (2025). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4.
- Erlin, E., Erni, E., Maggie, M., Vincent, V., & Zidane, Z. (2022). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatra Barat Menurut Lapangan Usaha. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 1(2), 187–192. <https://doi.org/10.54082/jupin.28>
- Fatimah, S., & Hasbullah, Y. (2020). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Product Domestic Regional Brutto (PDRB) Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016-2019. *EKONOBIS*, 6.
- Gulo, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional*.
- Hafizd, J. Z., Yadi Janwari, & Sofian Al-Hakim. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum

- Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146–167. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.58>
- Hasbullah, Y., Fatimah, S., & Handayani, T. (2021). ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN PRODUCT DOMESTIC REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2014-2018. *EKONOBIS*.
- Husna, H. N., Laut, L. T., & Prasetyanto, P. K. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Provinsi Banten Tahun 2004-2018. *Jurnal Ekonomi Indonesia*.
- Mukti, M. T. P., & Soraya, S. (2024). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan dan Tenaga Kerja. *JSN: Jurnal Sains Natural*, 2(2), 25–28. <https://doi.org/10.35746/jsn.v2i2.387>
- Napitupulu, R. S., Saragih, J. R., Hutagalung, G., & Situmeang, R. (2019). Pengaruh Dana Bagi Hasil Provinsi Dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 1(2), 75–84. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i2.583>
- Sabilla, T. M., & Sumarsono, H. (2022). Pengaruh belanja pemerintah, pendapatan asli daerah, penanaman modal dalam negeri, indeks pembangunan manusia terhadap PDRB. *FORUM EKONOMI*, 24(1), 54–64. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10382>
- Satria, A. D., Ridwansyah, & Habibi, A. (2023). Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto (Basis dan Non Basis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1213–1226.
- Sugara, W. H., Syahrani, D., Aulia, J., Yani, T., & Lubis, P. K. D. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap PDRB di Sumatera Utara. *EKOma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 4925–4938. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6604>
- Tanasya, L. F., & Setyanto, A. R. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia Tahun 2014-2023. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 58–65. <https://doi.org/10.32938/jep.v7i2.7095>
- Tradinatama, S., & Solikin, A. (2023). Pengaruh Dana Transfer terhadap Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perpendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8(3), 235–250. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i3.524>
- Winarni, E., Sari, Y., & Amali, M. (2023). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap PDRB Perkapita Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1182. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1394>